

# RENJA

TAHUN ANGGARAN 2022



**[RENCANA KERJA]**

**INSPEKTORAT KOTA CILEGON**  
**Jalan Jend Sudirman No 2**  
**Cilegon**

## KATA PENGANTAR

Puji Syukur kami panjatkan kehadiran Allah SWT, yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang atas Rahmat dan Karunia-Nya kami dapat menyelesaikan penyusunan Dokumen Perubahan Rencana Kerja (RENJA) Inspektorat Tahun Anggaran 2022 merupakan rencana kerja tahunan yang berupa turunan dari Rencana Strategis (RENSTRA) Inspektorat Kota Cilegon dengan mengacu kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah yang memuat penyesuaian anggaran regular tahun 2022 dengan kondisi dan situasi dalam pelaksanaan kegiatan.

Kami menyadari, didalam menyusun perubahan Rencana Kerja (RENJA) Inspektorat Kota Cilegon Tahun 2022 ini masih terdapat kekurangan, baik terkait dengan penyusunan Program, kegiatan dan tata cara penulisan. Namun demikian besar harapan kami agar Perubahan Rencana Kerja (RENJA) Inspektorat Kota Cilegon ini dapat bermanfaat, khususnya bagi Inspektorat dan pihak lain yang memerlukannya.

Cilegon, 21 Maret 2021



**H. EPUD SYAEFUDIN, SH**  
NIP. 19630328 199603 1 001

# DAFTAR ISI

	Hal
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>i</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>ii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>I-1</b>
1.1 Latar Belakang.....	I-1
1.2 Landasan Hukum.....	I-3
1.3 Maksud dan Tujuan.....	I-5
1.4 Sistematika Penulisan.....	I-5
<b>BAB II EVALUASI KINERJA TAHUN 2020 .....</b>	<b>II-1</b>
2.1 Pencapaian Kinerja tahun 2020 .....	II-1
2.2 Realisasi Anggaran Inspektorat TA 2020 .....	II-12
2.3 Analisis Kinerja Inspektorat.....	II-19
2.4 Isue-isue penting pelaksanaan tugas dan fungsi.....	II-21
<b>BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN .....</b>	<b>III-1</b>
3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional .....	III-1
3.2 Tujuan dan Sasaran .....	III-3
3.3 Rencana Program .....	III-3
3.3 Rencana Kegiatan .....	III-4
<b>BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN.....</b>	<b>IV</b>
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>V</b>
<b>LAMPIRAN</b>	

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 LATAR BELAKANG**

Setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di seluruh Pemerintah Daerah diwajibkan untuk menyusun Rencana Kerja untuk perencanaan perangkat daerah selama satu tahun, hal ini berdasarkan pada Undang-undang No 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-undang Nomor UU. No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah. Rencana Kerja tersebut digunakan sebagai alat untuk menerjemahkan dan merupakan penjabaran perencanaan strategis lima tahunan yang dituangkan dalam Rencana Strategis (RENSTRA) Inspektorat Kota Cilegon kedalam perencanaan tahunan yang sifatnya lebih operasional.

Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta tata cara Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah Pasal 27 kewajiban Organisasi Perangkat Daerah menyusun Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah Kerja (Renja-OPD) sebagai sebuah dokumen resmi OPD.

Rencana kerja Inspektorat Kota Cilegon mempunyai kedudukan yang strategis yaitu menjembatani antara perencanaan pada Inspektorat Kota Cilegon dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Cilegon, sebagai implementasi pelaksanaan strategis Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Cilegon, dimana Rencana Strategis Inspektorat Kota Cilegon dalam bidang pengawasan menjadi satu kesatuan untuk mendukung pencapaian Visi dan Misi Daerah.

Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kota Cilegon yang berfungsi sebagai dokumen perencanaan tahunan penyusunannya dengan memperhatikan seluruh aspirasi pemangku kepentingan, Pembangunan melalui Rencana Kerja (Renja) Inspektorat Kota Cilegon Tahun Anggaran 2022, Penyelenggaraan Musrenbang tahunan yang diselenggarakan secara berjenjang untuk keterpaduan Rancangan Renja OPD. sesuai amanat tersebut maka Inspektorat Kota Cilegon sebagai Organisasi Perangkat Daerah pada Tahun 2021 ini menyusun Rencana Kerja Inspektorat Kota Cilegon Tahun 2022.

Dokumen Rencana Kerja Inspektorat Kota Cilegon pada dasarnya merupakan hasil proses pemikiran yang strategis untuk menyikapi isu yang makin berkembang di masyarakat tentang perlunya pengawasan yang menyeluruh untuk lebih menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik (Good Governance) dan pemerintahan yang bersih (Clean Government) dengan mengimplementasikannya dalam program dan kegiatan Inspektorat Kota Cilegon. Kualitas dokumen rencana kerja yang dituangkan sangat ditentukan oleh kualitas program dan kegiatan yang akan dilaksanakan, sehingga penyusunan rencana kerja merupakan cerminan kemampuan Organisasi Perangkat Daerah dalam menyusun, mengorganisasikan, mengimplementasikan, mengendalikan dan mengawasi serta mengevaluasi capaian program dan kegiatan sesuai tugas dan fungsi dari Organisasi Perangkat Daerah.

Inspektorat Kota Cilegon merupakan unsur pengawasan penyelenggaraan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dipimpin oleh seorang Inspektur yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Walikota Cilegon dengan tugas membantu Walikota dalam menyelenggarakan pengawasan pelaksanaan urusan dan penyelenggaraan pemerintahan daerah secara teknis administratif mendapat pembinaan dari Sekretaris Daerah. Inspektorat Kota Cilegon berdasarkan Peraturan Walikota Cilegon Nomor 7 Tahun 2020 tentang kedudukan, susunan organisasi, Tugas dan Fungsi serta tata kerja inspektorat mempunyai tugas melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan dan penyelenggaraan pemerintahan daerah Kota Cilegon.

Dalam kaitan tersebut Inspektorat Kota Cilegon tentunya harus dapat melakukan tindakan korektif atas penyimpangan yang dilakukan terhadap pelaksanaan urusan dan penyelenggaraan pemerintahan di daerah apabila tidak sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku, serta melakukan pembinaan kepada seluruh Organisasi Perangkat Daerah yang berada di dalam wilayah Pemerintahan Kota Cilegon. Hal tersebut dilakukan dalam rangka menciptakan tata kelola Pemerintah Kota Cilegon yang baik dan pemerintahan yang bersih .

## **1.2 LANDASAN HUKUM**

Rencana Kerja (RENJA) Inspektorat Kota Cilegon Tahun 2022 disusun dengan berlandaskan pada peraturan perundang-undangan berikut :

1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Cilegon dan Kotamadya Daerah Tingkat II Depok (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3858);
2. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bebas dan Bersih dari KKN;
3. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
5. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025 (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 68 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4725);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114);
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
  10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
  11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
  12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam negeri Nomor 8 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
  13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Raperda Tentang RPJPD dan RPJMD, Serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD, dan RKPD ;
  14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodesifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
  15. Peraturan Daerah Kota Cilegon Nomor 7 Tahun 2010 tentang Rencana tata ruang wilayah Kota Cilegon Tahun 2010 – 2030;
  16. Peraturan Daerah Kota Cilegon Nomor 19 Tahun 2006 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Cilegon;

17. Peraturan Daerah Kota Cilegon Nomor 3 Tahun 2016 tentang pembentukan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Cilegon Tahun 2016 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Cilegon Tahun 2016 Nomor 91) ;
18. Peraturan Walikota Cilegon Nomor 7 Tahun 2020 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Inspektorat.

### **1.3. MAKSUD DAN TUJUAN**

#### **1.3.1. MAKSUD**

Maksud dari penyusunan Rencana Kerja Inspektorat Kota Cilegon Tahun 2022 adalah sebagai penjabaran tujuan dan sasaran Inspektorat Kota Cilegon pada tahun 2022 sebagaimana tertuang dalam dokumen Rencana Strategis (RENSTRA) Inspektorat yang merupakan turunan dari RPJMD Kota Cilegon tahun 2021-2026 .

#### **1.3.2. TUJUAN**

Tujuan dokumen Renstra adalah sebagai acuan untuk memberikan arah dan langkah yang jelas Inspektorat dalam melaksanakan program dan kegiatan dalam pengawasan pemerintahan daerah pada tahun anggaran 2022.

### **1.4 SISTEMATIKA PENULISAN**

Rencana Kerja (RENJA) Inspektorat Kota Cilegon Tahun 2022, disusun dengan sistematika penulisan adalah sebagai berikut :

## **BAB I PENDAHULUAN**

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan



## **BAB II HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN LALU**

- 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Inspektorat Tahun 2020.
- 2.2 Analisis Kinerja Inspektorat
- 2.3 Isu-isu penting pelaksanaan tugas dan fungsi

## **BAB III TUJUAN, SASARAN, PERANGKAT DAERAH**

- 3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional
- 3.2 Kebijakan dan Strategi Inspektorat
- 3.3 Tujuan dan Sasaran Renstra Inspektorat
- 3.4** Program dan Kegiatan Inspektorat

## **BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN**

## **BAB V PENUTUP**

## **BAB II**

# **EVALUASI KINERJA TAHUN SEBELUMNYA**

### **2.1 Pencapaian Kinerja Tahun 2020**

Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dengan penyusunan dokumen didasarkan pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) dan capaian indikator kinerja makro diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerjanya masing-masing, sedangkan capaian kinerja sasaran strategis diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerja sasaran strategis. Cara penyimpulan hasil pengukuran kinerja pencapaian sasaran strategis dilakukan dengan membuat capaian rata-rata atas capaian indikator kinerja sasaran.

Dalam laporan ini, Inspektorat Kota Cilegon dapat memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target kegiatan dari masing-masing kelompok indikator kinerja kegiatan dan penilaian tingkat pencapaian target sasaran dari masing-masing indikator kinerja sasaran yang ditetapkan dalam dokumen Renstra 2021 – 2026 maupun Renja Tahun 2020.

Sesuai ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam mewujudkan tujuan instansi pemerintah. Dalam rangka mengukur peningkatan kinerja serta lebih meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah, maka setiap instansi pemerintah perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU). IKU digunakan sebagai ukuran keberhasilan dari instansi pemerintah yang bersangkutan.

Evaluasi bertujuan agar diketahui pencapaian realisasi, kemajuan dan kendala yang dijumpai dalam rangka pencapaian misi, agar dapat dinilai dan dipelajari guna perbaikan pelaksanaan program/kegiatan di masa yang akan datang. Selain itu, dalam evaluasi kinerja dilakukan pula analisis efisiensi dengan cara membandingkan antara output dengan input baik untuk rencana maupun realisasi. Analisis ini menggambarkan tingkat efisiensi yang dilakukan oleh instansi dengan memberikan data nilai output per unit yang dihasilkan oleh suatu input tertentu. Selanjutnya dilakukan pula pengukuran/penentuan tingkat efektivitas yang menggambarkan tingkat kesesuaian antara tujuan dengan hasil, manfaat atau dampak. Selain itu, evaluasi juga dilakukan terhadap setiap perbedaan kinerja (*performance gap*) yang terjadi, baik terhadap penyebab terjadinya gap maupun strategi pemecahan masalah yang telah dan akan dilaksanakan.

Dalam melakukan evaluasi kinerja, perlu juga digunakan perbandingan antara Kinerja nyata dengan kinerja yang direncanakan dan Kinerja nyata dengan kinerja tahun-tahun sebelumnya.

### **1 Proporsi OPD Dengan Nilai LAKIP B.**

Evaluasi LAKIP OPD pada Tahun 2020 yang dilaksanakan terhadap LAKIP OPD pada tahun 2019 di lingkungan Pemerintah Kota Cilegon berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: 25/2012 Jo 20/2013 tentang Pedoman Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang diubah terakhir kali dengan PERMENPAN RB Nomor 12 Tahun 2015 tentang pedoman evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

Tabel 2.1  
Perbandingan Target dan Realisasi Indikator  
OPD Yang Memiliki Nilai LAKIP Minimal B Tahun 2020

Indikator	Jumlah Nilai Lakip OPD Minimal B		
	Target	Realisasi	Capaian dari target
OPD yang memiliki nilai LAKIP Minimal B	60 %	78,38 %	130,63%

Berdasarkan hasil evaluasi Laporan Kinerja Organisasi Perangkat Daerah oleh Tim evaluasi Inspektorat Kota Cilegon sebagaimana tercantum dalam tabel diatas, merupakan hasil penyusunan Laporan Kinerja 2019 yang dievaluasi pada tahun 2020.

Untuk mencapai target tersebut, Inspektorat melaksanakan Pembuatan Pedoman Evaluasi Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Pembentukan tim evaluasi Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun Anggaran 2020 dan pendampingan penyusunan Laporan Kinerja OPD oleh APIP Inspektorat Kota Cilegon.

Dengan diterbitkannya IKU Inspektorat Kota Cilegon Tahun 2020 yang memiliki satu sasaran yaitu Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan, pengukuran sasaran ini diperoleh melalui salah satu indikator kinerja yaitu Proporsi OPD yang memiliki nilai evaluasi LAKIP oleh Inspektorat Minimal B. Pada tahun 2020, kinerja indikator ini ditentukan target sebesar 60%. Dari hasil evaluasi diketahui bahwa sejumlah 29 OPD telah mencapai hasil evaluasi minimal B dari sejumlah total 37 OPD, capaian indikator tersebut mencapai 78,38% dari sejumlah OPD yang ada di Kota Cilegon, sekaligus menunjukkan bahwa indikator tersebut sudah mencapai lebih dari target yang ditentukan.

Adapun hasil nilai evaluasi LAKIP OPD pada tahun 2020 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.2  
Hasil Evaluasi LAKIP OPD Tahun 2020

NO	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (OPD)	NILAI	
		ANGKA	HURUF
1	SEKRETARIAT DAERAH	63,21	B
2	SEKRETARIAT DPRD	64,41	B
3	INSPEKTORAT	82,16	A
4	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	77,02	BB
5	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	70,91	BB
6	BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	64,51	B
7	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	63,50	B
8	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	72,33	BB
9	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG	58,55	CC
10	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN	80,44	A
11	DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA	61,71	B
12	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN	79,71	BB
13	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, SANDI DAN STATISTIK	78,08	BB
14	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH	67,32	B
15	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	81,17	A
16	DINAS SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	60,88	B
17	DINAS PENDIDIKAN	80,11	A
18	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	81,44	A
19	DINAS TENAGA KERJA	67,54	B
20	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	60,63	B
21	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN	67,15	B
22	DINAS KESEHATAN	74,91	BB
23	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KB	64,64	B
24	DINAS SOSIAL	75,41	BB

25	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	62,32	B
26	DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO DAN KECIL	60,94	B
27	DINAS PERHUBUNGAN	57,84	CC
28	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN	62,31	B
29	RSUD KOTA CILEGON	59,18	CC
30	KECAMATAN CIWANDAN	50,37	CC
31	KECAMATAN JOMBANG	60,72	B
32	KECAMATAN CILEGON	59,19	CC
33	KECAMATAN CITANGKIL	56,63	CC
34	KECAMATAN PURWAKARTA	60,51	B
35	KECAMATAN CIBEBER	69,21	B
36	KECAMATAN GROGOL	57,75	CC
37	KECAMATAN PULOMERAK	52,68	CC

Keterangan :

Jumlah OPD : 37 OPD

Jumlah OPD dengan Nilai Lakip minimal B : 29 OPD

## 2 Proporsi OPD yang memiliki maturitas SPIP Level 3 (terdefinisi)

Inspektorat Kota Cilegon pada tahun 2018 telah melaksanakan bintek dan penilaian maturitas mandiri (self assesment) yang diikuti sebanyak 12 OPD adapun capaian indikator yang tertuang diperoleh nilai maturitas level 3 sejumlah 12 OPD disajikan dalam tabel berikut ini :

Table 2.3  
Nilai Maturitas SPIP OPD Tahun 2018

No	OPD	Nilai
1.	Inspektorat;	3,0375
2.	Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan;	3,0375
3.	Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah;	3,0375
4.	Dinas Penanaman Modal dan Perijinan Terpadu Satu Pintu;	3,0375

5.	Dinas Komunikasi, Informatika, Sandi dan Statistik;	3,0375
6.	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah;	3,0375
7.	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman;	3,0375
8.	Sekretariat Daerah;	3,0375
9.	Dinas Kesehatan;	3,0375
10.	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;	3,0375
11.	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;	3,0375
12.	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.	3,0375

Penetapan level 3 dari 12 OPD diatas berdasarkan hasil konsultasi BPKP Perwakilan Provinsi Banten bahwa nilai maturitas SPIP OPD disamakan dengan nilai maturitas SPIP Kota.

Kemudian pada tahun 2019 Inspektorat mengadakan evaluasi penilaian maturitas SPIP terhadap beberapa OPD yang belum dievaluasi pada tahun 2018 dengan jumlah 27 OPD, tetapi terdapat 2 OPD yang pada tahun 2018 sebelumnya juga telah dilakukan evaluasi yaitu Inspektorat dan Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan.

Berdasarkan surat nomor 700/0003/Sekret tanggal 2 Januari 2020 Perihal Laporan Penilaian Maturitas level SPIP tingkat OPD Kota Cilegon Tahun 2019, diketahui bahwa pengukuran terhadap 25 fokus penilaian maturitas menghasilkan nilai maturitas SPIP pada 27 OPD sebagai berikut :

1. OPD yang memiliki tingkat maturitas "Berkembang" (level 2), yaitu :

NO	OPD	NILAI
1.	Dinas Tenaga Kerja;	2,9000
2.	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian;	2,9000
3.	Dinas Kesatuan Bangsa dan Politik;	2,8398
4.	Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah;	2,7773
5.	Dinas Perdagangan dan Perindustrian;	2,7545
6.	Dinas Pemuda dan Olahraga;	2,5920
7.	Kecamatan Pulomerak;	2,5773
8.	Dinas Satuan Polisi Pamong Praja;	2,5773

9.	Dinas Pemadam Kebakaran;	2,5523
10.	Kecamatan Citangkil;	2,3091
11.	Sekretariat DPRD.	2,1511

Data yang tercantum dalam tabel di atas menunjukkan data beberapa OPD yang memiliki nilai maturitas pada level berkembang atau level 2, sehingga tidak masuk kedalam perhitungan yang memenuhi target yang ditentukan.

2. OPD yang memiliki tingkat maturitas "Terdefinisi" (level 3), yaitu :

NO	OPD	NILAI
1.	Inspektorat;	3,0375
2.	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan;	3,0375
3.	Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Kecil;	3,0000
4.	Dinas Pemberdayaan Perempuan, PA dan KB;	3,0000
5.	Dinas Sosial;	3,0000
6.	Dinas Perhubungan;	3,0000
7.	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan;	3,0000
8.	Badan Penanggulangan Bencana Daerah;	3,0000
9.	Dinas Lingkungan Hidup;	3,0000
10.	RSUD Kota Cilegon;	3,0000
11.	Kecamatan Purwakarta;	3,0000
12.	Kecamatan Jombang;	3,0000
13.	Kecamatan Cilegon;	3,0000
14.	Kecamatan Ciwandan;	3,0000
15.	Kecamatan Cibeber;	3,0000
16.	Kecamatan Grogol.	3,0000

Data pada tabel di atas menunjukkan terdapat 16 OPD yang berdasarkan pengujian maturitas SPIP pada tahun 2019 berada pada level terdefinisi atau level 3, sehingga masuk ke dalam perhitungan sesuai target IKU yang ditetapkan.



Dari hasil penilaian maturitas SPIP pada OPD yang sudah dilaksanakan sampai tahun 2019 diketahui bahwa jumlah OPD yang telah mencapai maturitas SPIP level 3 sejumlah 26 OPD dari total 38 OPD seperti tercantum dalam tabel hasil penilaian Maturitas SPIP berikut ini :

Tabel 2.4  
Hasil Penilaian Level Maturitas SPIP sampai Tahun 2019

No	OPD	Nilai
1	Inspektorat;	3,0375
2	Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan;	3,0375
3	Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah;	3,0375
4	Dinas Penanaman Modal dan Perijinan Terpadu Satu Pintu;	3,0375
5	Dinas Komunikasi, Informatika, Sandi dan Statistik;	3,0375
6	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah;	3,0375
7	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman;	3,0375
8	Sekretariat Daerah;	3,0375
9	Dinas Kesehatan;	3,0375
10	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;	3,0375
11	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;	3,0375
12	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.	3,0375
13	Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Kecil;	3,0000
14	Dinas Pemberdayaan Perempuan, PA dan KB;	3,0000
15	Dinas Sosial;	3,0000
16	Dinas Perhubungan;	3,0000
17	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan;	3,0000
18	Badan Penanggulangan Bencana Daerah;	3,0000
19	Dinas Lingkungan Hidup;	3,0000
20	RSUD Kota Cilegon;	3,0000
21	Kecamatan Purwakarta;	3,0000
22	Kecamatan Jombang;	3,0000
23	Kecamatan Cilegon;	3,0000
24	Kecamatan Ciwandan;	3,0000
25	Kecamatan Cibeber;	3,0000

26	Kecamatan Grogol.	3,0000
27	Dinas Tenaga Kerja;	2,9000
28	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian;	2,9000
29	Dinas Kesatuan Bangsa dan Politik;	2,8398
30	Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah;	2,7773
31	Dinas Perdagangan dan Perindustrian;	2,7545
32	Dinas Pemuda dan Olahraga;	2,5920
33	Kecamatan Pulomerak;	2,5773
34	Dinas Satuan Polisi Pamong Praja;	2,5773
35	Dinas Pemadam Kebakaran;	2,5523
36	Kecamatan Citangkil;	2,3091
37	Sekretariat DPRD.	2,1511

Dari tabel yang disajikan dapat diketahui jumlah OPD yang mencapai nilai maturitas SPIP Terdefinisi atau level 3 adalah sejumlah 23 OPD dari total 37 OPD atau tercapai sebesar 70,27%. Hasil tersebut menunjukkan bahwa capaian sampai dengan tahun 2019 telah melampaui dari target yang ditentukan sebesar 40%.

Sedangkan pada tahun 2020 kemarin, Inspektorat melakukan penilaian maturitas terhadap 11 OPD yang memiliki nilai evaluasi maturitas dibawah 3. Dari hasil penilaian yang dilaksanakan oleh Inspektorat kota cilegon diketahui bahwa nilai maturitas semua OPD sudah mencapai 100 % dengan rincian hasil seperti tercantum di bawah ini :

Tabel 2.5  
Hasil Penilaian Level Maturitas SPIP pada Tahun 2020

No	Nama OPD	Skor Maturitas SPIP
1	Dinas Tenaga Kerja	3,0000
2	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	3,0000
3	Badan Kesatuan Bangsa dan politik	3,0000
4	Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah	3,0000

5	Dinas Perdagangan dan Perindustrian	3,0000
6	Dinas Pemuda dan Olahraga	3,0000
7	Kecamatan PuloMerak	3,0000
8	Dinas Satuan Pamong Praja	3,0000
9	Dinas Pemadam Kebakaran	3,0000
10	Kecamatan Citangkil	3,0000
11	Sekretariat DPRD	3,0000

Hal ini menunjukkan bahwa target capaian indikator sampai pada tahun 2020 tercapai seperti tercantum dalam tabel berikut ini :

Table 2.6

Capaian Indikator Kinerja Level Maturitas SPIP sampai tahun 2020

INDIKATOR KINERJA	Target 2020 (%)	Realisasi 2020 (%)	Capaian dari Target (%)
Proporsi OPD yang memiliki maturitas SPIP Level 3	50	100	200

### 3 Prosentase Temuan Yang Sudah Ditindaklanjuti

Dalam Rencana Kerja Inspektorat Kota Cilegon target persentase penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan internal dan eksternal pada tahun 2020 sebesar 83 %. Pada tahun sebelumnya Realisasi penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan internal dan eksternal Sampai dengan Tahun 2019 sebesar 94% dengan target 80% jadi capaian pada tahun 2019 sudah melebihi dari target dengan capaian 100%.

Tabel 2.7

Capaian Temuan yang sudah ditindaklanjuti pada tahun 2020

SASARAN	INDIKATOR KINERJA	2020		
		TARGET	REALISASI	CAPAIAN
Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan	Persentase temuan yang sudah ditindaklanjuti.	83%	83,45%	100,54%

Pada tahun 2020, capaian Kinerja terhadap indikator Prosentasi Temuan yang Sudah ditindaklanjuti melebihi target yang ditentukan dengan capaian sebesar 83,45% dari target capaian 83%. Dan Pencapaian target indikator kinerja ini dilaksanakan melalui evaluasi Tindak Lanjut temuan APIP dan temuan eksternal diLingkungan Pemerintah Kota Cilegon.

#### 4 Peningkatan Level Kapabilitas APIP

Dalam rangka peningkatan kualitas kinerja pengawasan Inspektorat Kota Cilegon dengan dibina oleh BPKP Perwakilan Provinsi Banten guna mewujudkan birokrasi yang bersih dan akuntabel melalui peningkatan kapasitas dan independensi pengawasan sebagaimana ditetapkan dalam RPJMN 2015-2019, maka Inspektorat Kota Cilegon pada tahun 2020 telah melakukan penilaian mandiri terhadap Kapabilitas APIP yang terdiri dari beberapa Elemen dengan hasil yang tertuang Pada Tabel berikut ini:

Tabel 2.8

Evaluasi Mandiri Capaian Kinerja Meningkatnya Level Kapabilitas APIP sampai dengan Tahun 2020

NO	ELEMEN	LEVEL
1	Peran dan Layanan	3
2	Pengelolaan Sumber Daya Manusia	3
3	Praktik Profesional	3
4	Akuntabilitas dan Manajemen Kinerja	3
5	Budaya dan Hubungan Organisasi	3
6	Struktur Tata Kelola	3

Pada tahun 2020 berdasarkan Rencana Strategis Inspektorat Kota Cilegon mempunyai target capaian Kapabilitas APIP pada level 3 penuh, dan dengan data yang telah disampaikan diatas dapat disimpulkan bahwa tahun 2020 target tersebut dapat tercapai dengan hasil penilaian mandiri level 3 penuh dengan kata lain target tercapai 100%.

Tabel 2.9

Capaian Kinerja Meningkatkan Level Kapabilitas APIP Tahun 2020

INDIKATOR	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
Peningkatan level Kapabilitas APIP	3 Penuh	3 Penuh	100 %

## 2.2 Realisasi Anggaran Inspektorat Tahun Anggaran 2020

Pelaksanaan program dan kegiatan Tahun Anggaran dalam rangka menjalankan tugas dan fungsi serta untuk mewujudkan target kinerja yang ingin dicapai Inspektorat Kota Cilegon, dianggarkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Cilegon. Total Anggaran Inspektorat Kota Cilegon pada Tahun 2020 sejumlah Rp. 14.355.795.848,-. Dari total anggaran tersebut terserap sejumlah Rp. 13.138.631.418,- dengan prosentase serapan yaitu 91,52%. Jika dibandingkan dengan anggaran pada Tahun 2019 sebesar Rp 15.147.815.204 dengan realisasi anggaran mencapai Rp 13.993.759.799,- atau 92,38% dari total anggaran, maka pada tahun 2020 Inspektorat Kota Cilegon mengalami penurunan jumlah total anggaran Rp.792.019.356,- dan penurunan jumlah serapan anggaran sebesar 0,86% jika dibandingkan pada tahun 2019, Anggaran yang tidak diserap tersebut merupakan penghematan penggunaan anggaran. Dengan kondisi Anggaran Belanja Inspektorat sejumlah Rp 14.355.795.848,- yang terdiri dari :

1. Anggaran Belanja Tidak Langsung sejumlah Rp 9.415.171.365,- dengan realisasi sejumlah Rp 8.483.456.689,- atau sebesar 90,10%;
2. Anggaran Belanja Langsung sejumlah Rp 3.779.116.533,- dengan realisasi sejumlah Rp. 3.518.899.433,- atau sebesar 93,11% yang terbagi atas :
  - a) Anggaran untuk pelaksanaan program dukungan layanan pemerintah yang bersifat umum / rutin dipergunakan untuk mendukung pencapaian sasaran organisasi sejumlah Rp 1.161.507.950,- dengan realisasi sejumlah Rp 1.136.275.296,- (97,83%);

- b) Anggaran untuk pelaksanaan program yang bersifat teknis yaitu Program Peningkatan Pengawasan Pembangunan Daerah sebesar Rp. 3.779.116.533,- dengan realisasi sebesar Rp 3.518.899.433,- (93,11%).

adapun lebih detail disajikan dalam tabel berikut ini :

Tabel 2.10

Realisasi Anggaran Inspektorat Kota Cilegon Tahun 2020

Uraian	Anggaran 2020	Realisasi 2020		Efisiensi	
		Rp.	%	Rp.	%
<b>Belanja Tidak Langsung</b>	<b>9.415.171.365</b>	<b>8.483.456.689</b>	<b>90,10</b>	<b>931.714.676</b>	<b>9,90</b>
<b>Belanja Langsung</b>	<b>3.779.116.533</b>	<b>3.518.899.433</b>	<b>93,11</b>	<b>143.295.875</b>	<b>6,89</b>
Program Dukungan Layanan Pemerintahan	1.161.507.950	1.136.275.296	97,83	25.232.654	2,17
Program Peningkatan Pengawasan Pembangunan Daerah	3.779.116.533	3.518.899.433	93,11	143.295.875	6,89
<b>Jumlah BTL + BL</b>	<b>14.355.795.848</b>	<b>13.138.631.418</b>	<b>91,52</b>	<b>1.217.164.430</b>	<b>8,48</b>

### 1. Program Dukungan Layanan Pemerintah

Program Dukungan Layanan Pemerintah merupakan salah satu program yang terdiri dari beberapa kegiatan dalam rangka meningkatkan pengawasan dan pembinaan pelaksanaan pembangunan sekaligus pengawal dalam rangka melaksanakan program dan kegiatan yang tertuang pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) , Salah satu indikator keberhasilan Program Dukungan layanan pemerintah adalah meningkatnya Jumlah pemenuhan jabatan fungsional secara bertahap, Jumlah Aparat Pengawas Intern yang mengikuti diklat dan meningkatnya nilai kapabilitas APIP. Pencapaian Program dalam kegiatan dukungan layanan pemerintah tergambar pada tabel berikut ini :

Tabel 2.11  
Realisasi Anggaran Program Dukungan Layanan Pemerintahan

PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	ANGGARAN (Rp.)			KINERJA (%)		
		PAGU ANGGARAN	REALISASI	CAPAIAN (%)	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
<b>PROGRAM DUKUNGAN PELAYANAN PEMERINTAHAN</b>							
Penyediaan jasa surat menyurat	Tersedianya Jasa Surat Menyurat	3.024.000,00	3.024.000,00	100	100	80	80
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air & Listrik	1.000.000,00	652.010,00	65,2	100	100	100
Penyediaan jasa administrasi keuangan	Tersedianya Jasa Administrasi Keuangan	0	0	0	0	0	0
Penyediaan jasa promosi dan propaganda	Tersedianya Jasa Promosi Propaganda	3.200.000,00	3.200.000,00	100	100	95	95
Penyediaan alat tulis kantor	Tersedianya Alat Tulis Kantor	140.000.000,00	139.301.900,00	99,5	100	80	80
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Tersedianya Barang Cetak & Penggandaan	85.000.000,00	83.500.200,00	98,24	100	80	80
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan	4.650.000,00	4.650.000,00	100	100	100	100
Penyediaan peralatan rumah tangga	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	12.500.250,00	12.500.250,00	100	100	100	100
Penyediaan makanan dan minuman	Tersedianya makanan & Minuman	104.000.000,00	103.904.590,00	99,91	100	100	100
Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah	Tersedianya Rapat Koordinasi & Konsultasi dalam dan Luar Daerah	144.723.900,00	144.444.550,00	99,81	100	100	100
Pengadaan komputer	Tersedianya Komputer	0	0	0	0	0	0
Pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor	Tersedianya peralatan perlengkapan kantor	0	0	0	0	0	0

**Inspektorat Kota Cilegon**

Pengadaan alat-alat studio	Tersedianya Peralatan Studio kantor	0	0	0	0	0	0
Pemeliharaan dan perijinan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Tersedianya Pemeliharaan dan Perijinan rutin/berkala kendaraan dinas/Operasional	324.025.000,00	306.772.500,00	94,68	100	100	100
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan perlengkapan kantor	Tersedianya Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan & Perlengkapan Kantor	80.000.000,00	79.940.000,00	99,93	100	100	100
Pemeliharaan rutin/berkala komputer	Tersedianya Pemeliharaan Rutin/ Berkala Komputer	79.574.800,00	79.430.000,00	99,82	100	100	100
Penyediaan pakaian olahraga	Tersedianya Pakaian olahraga	0	0	0	0	0	0
Penyediaan jasa jaminan/pemeliharaan kesehatan	Tersedianya jasa jaminan/pemeliharaan kesehatan	7.100.000,00	5.095.296,00	71,76	100	100	100
Dukungan Pelaksanaan PHBN/PHBI dan Hari Jadi Kota Cilegon	Tersedianya Dukungan Kegiatan PHBI/PHBN Kota Cilegon	0	0	0	0	0	0
Penyediaan jasa pegawai non PNS	Tersedianya Jasa Pegawai Non PNS	84.900.000,00	82.050.000,00	96,64	100	100	100
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tersedianya bahan bacaan dan Peraturan Per UU	50.000.000,00	50.000.000,00	100	100	90	90
Penatausahaan Keuangan dan Aset OPD	tersedianya Penatausahaan Keuangan SKPD	27.000.000,00	27.000.000,00	100	100	100	100
Penyusunan Laporan Keuangan Perangkat Daerah	Tersedianya Laporan Keuangan	2.100.000,00	2.100.000,00	100	100	100	100
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersedianya Dokumen Perencanaan OPD	8.710.000,00	8.710.000,00	100	100	90	90



## 2. Program Peningkatan Pengawasan Pembangunan Daerah

Program Peningkatan Pengawasan Pembangunan Daerah merupakan salah satu program yang terdiri dari beberapa kegiatan dalam meningkatkan perencanaan pengawasan dan pembinaan pelaksanaan pembangunan sekaligus pengawal dalam rangka melaksanakan program dan kegiatan yang tertuang pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) serta mengembangkan dan menerapkan tertib administrasi melalui sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas dan terukur sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdayaguna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab dalam upaya mencegah sedini mungkin terjadinya penyimpangan, pemborosan dan hambatan dalam mencapai tujuan pada Perangkat Daerah agar terselenggaranya tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih (good and clean governance) . Pencapaian kinerja pada program peningkatan pengawasan pembangunan daerah tergambar pada tabel berikut ini :

**Tabel 2.12**  
**Realisasi Anggaran Program peningkatan**  
**Pengawasan pembangunan daerah**

PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	ANGGARAN (Rp.)			KINERJA (%)		
		PAGU ANGGARAN	REALISASI	CAPAIAN (%)	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
<b><u>PROGRAM PENINGKATAN PENGAWASAN PEMBANGUNAN DAERAH</u></b>							
Rapat Koordinasi Pengawasan	Terlaksananya Rapat Koordinasi Pengawasan	73.850.000,00	73.850.000,00	100	100	100	100
Peningkatan kualitas aparatur pengawas internal pemerintah	Terlaksananya Peningkatan Kualitas Aparatur Pengawas Internal Pemerintah	49.500.000,00	36.500.000,00	73,74	100	100	100
Bintek sistem pengendalian intern	Terlaksananya Bintek Sistem Pengendalian Intern Pemerintah	2.100.000,00	2.100.000,00	100	100	100	100
Penyusunan PKPT Inspektorat	Terlaksananya Penyusunan PKPT Inspektorat	5.907.000,00	5.907.000,00	100	100	100	100
Evaluasi roadmap reformasi birokrasi	Terlaksananya Evaluasi Roadmap Reformasi Birokrasi	9.913.000,00	9.912.500,00	99,99	100	100	100
Evaluasi Maturitas SPIP	Terlaksananya	100.000.000,00	53.889.600,00	53,89	100	100	100

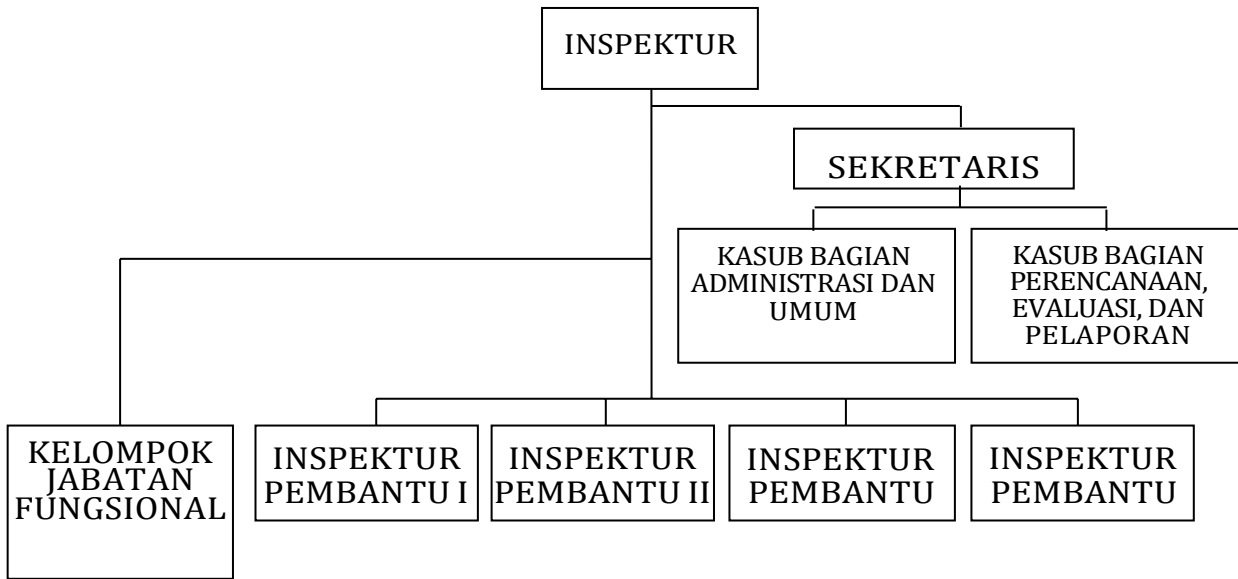
	Evaluasi Maturitas SPIP						
Peningkatan Level Kapabilitas APIP	Terlaksananya Peningkatan Level Kapabilitas APIP	26.000.000,00	13.680.000,00	52,62	100	100	100
Pengawasan Pembangunan Kota Cilegon	Terlaksananya Pengawasan Pembangunan Kota Cilegon	3.475.096.533,00	3.286.310.333,00	94,57	100	100	100
Survey Penilaian Integritas	Terlaksananya Pengawasan Pembangunan Daerah Bidang P2UPD	0	0	0	0	0	0
Dukungan Operasional Unit Pengendalian Gratifikasi dan Satuan Tugas Saber Pungli	Tersedianya Unit Pengendalian Gratifikasi dan satuan tugas saber pungli	36.750.000,00	36.750.000,00	100	100	100	100

### 2.3 Analisis Kinerja Pelayanan Inspektorat Kota Cilegon

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Cilegon Nomor 3 Tahun 2016 tentang pembentukan perangkat daerah dan Peraturan Walikota Cilegon Nomor 7 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Inspektorat, mencantumkan bahwa Inspektorat mempunyai tugas membantu Walikota dalam membina dan mengawasi pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan oleh perangkat daerah, dengan menyelenggarakan fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan;
- b. Pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, revidu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya;
- c. Pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Walikota;
- d. Penyusunan Laporan Hasil Pengawasan;
- e. Pelaksanaan administrasi Inspektorat; dan
- f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota terkait dengan tugas dan fungsinya.

Dalam melaksanakan tugas dan kewajiban, Inspektorat dipimpin oleh Inspektur, yang dalam pelaksanaan tugasnya dibantu oleh Sekretaris dan para Inspektur Pembantu serta Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana tergambar dalam Struktur Organisasi sebagai berikut :



**Gambar 1 : Struktur Organisasi Inspektorat 2020**

Inspektorat Kota Cilegon merupakan unsur pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dipimpin oleh seorang Inspektur yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Walikota Cilegon dengan tugas dan Fungsi membantu Walikota dalam menyelenggarakan pengawasan pelaksanaan urusan dan penyelenggaraan pemerintahan daerah dan secara teknis administratif mendapat pembinaan dari Sekretaris Daerah.

Dalam kaitan tersebut Inspektorat Kota Cilegon tentunya harus dapat melakukan tindakan korektif atas penyimpangan yang dilakukan terhadap pelaksanaan urusan dan penyelenggaraan pemerintahan di daerah apabila tidak sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku, serta melakukan pembinaan kepada seluruh Satuan Organisasi Perangkat Daerah yang berada di dalam wilayah Pemerintahan Kota Cilegon. Hal tersebut dilakukan dalam rangka menciptakan tata kelola Pemerintah Kota Cilegon yang baik dan pemerintahan yang bersih sesuai dengan Visi Kota Cilegon sebagai Kota yang **“unggul dan sejahtera berbasis industri perdagangan dan Jasa”**

Diakui bahwa belum sepenuhnya program dan kegiatan yang dilaksanakan mencapai apa yang diharapkan karena masih terdapatnya beberapa permasalahan dan kendala yang dihadapi, namun demikian hampir sebagian besar kegiatan tersebut telah mendekati sasaran dan tujuan program.

## **2.4 Isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Inspektorat Kota Cilegon**

Pelaksanaan pengawasan terhadap pembangunan dan Pemerintahan Kota Cilegon pada tahun 2020 berjalan lancar dan sesuai dengan target yang diharapkan, tetapi hal itu tidak lepas dari beberapa permasalahan dan kendala yang dihadapi, beberapa kendala permasalahan yang ditemui yaitu :

### **a. Permasalahan**

1. Untuk melaksanakan Tugas Pokok dan Fungsi Inspektorat belum memiliki tempat kerja/gedung yang representatif, belum memiliki ruang rapat khusus maupun klinik Consulting untuk OPD yang membutuhkan pendampingan maupun konsultasi mengenai hal-hal yang harus ditindak lanjuti,
2. Dengan bertambahnya Jabatan Fungsional P2UPD masih dibutuhkan alat perlengkapan kantor dan Kendaraan Operasional dalam rangka menunjang pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi.
3. Profesionalisme APIP masih perlu ditingkatkan berdasarkan kapasitas, kompetensi, dan kapabilitas maupun integritasnya;
4. Dalam upaya peningkatan profesionalisme APIP, APIP memerlukan peningkatan kualitas setiap tahunnya, sedangkan Inspektorat belum mempunyai anggaran sendiri untuk kegiatan tersebut, yang sudah berjalan masih menggunakan anggaran diklat dari BKPP, sehingga adanya keterbatasan dalam pengirimannya.
5. Belum maksimalnya OPD dalam menindaklanjuti temuan eksternal maupun internal.

**b. Solusi**

1. Penataan gedung yang lebih representatif.
2. Pengadaan Alat perlengkapan kantor dan Kendaraan Operasional sesuai dengan rencana kebutuhan dalam rangka menunjang Tugas Pokok dan Fungsi.
3. Mengajukan Pengelolaan anggaran diklat APIP yang dikelola sendiri oleh Inspektorat sehingga peningkatan kompetensi Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) sesuai harapan.
4. Meningkatkan koordinasi dan publikasi serta pemantauan Tindak Lanjut hasil pemeriksaan eksternal (BPK RI) dan Pemeriksaan Internal (Inspektorat, Inspektorat Provinsi, BPKP dan Itjen Kemendagri).
5. Memaksimalkan koordinasi dengan OPD dalam menindaklanjuti temuan eksternal maupun internal.

## **BAB III**

# **TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN**

### **3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional**

Dalam arah kebijakan bidang aparatur negara salah satunya adalah menuntaskan penanggulangan penyalahgunaan kewenangan dalam bentuk praktek-praktek KKN, melalui penerapan prinsip-prinsip tata-pemerintahan yang baik (good governance) pada semua tingkat dan lini pemerintahan dan pada semua kegiatan; pemberian sanksi yang seberat-beratnya bagi pelaku KKN sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan peningkatan efektivitas pengawasan Aparatur Negara melalui koordinasi dan sinergi pengawasan serta percepatan pelaksanaan tindak lanjut hasil-hasil pengawasan dan pemeriksaan

Program Peningkatan Pengawasan Pembangunan Daerah merupakan salah satu program di Inspektorat Kota Cilegon yang bertujuan menyempurnakan dan mengefektifkan system pengawasan dan audit, serta system akuntabilitas kinerja pemerintah (Sistem AKIP) dalam mewujudkan aparatur yang bersih, sasaran yang akan dicapai adalah terwujudnya system pengawasan dan audit, serta system akuntabilitas kinerja yang efektif dan akuntabel dilingkungan aparatur Pemerintah Kota Cilegon.

Peningkatan pengawasan dapat dilakukan dengan cara meningkatkan intensitas dan kualitas pelaksanaan pengawasan dan audit internal, audit eksternal dan pengawasan oleh masyarakat; menata dan menyempurnakan kebijakan system struktur kelembagaan dan prosedur pengawasan yang independen, efektif, efisien, transparan dan terukur; menindaklanjuti temuan pengawasan; meningkatkan koordinasi pengawasan; meningkatkan koordinasi pengawasan yang lebih komprehensif; mengembangkan penerapan pengawasan berbasis kinerja; dan mengembangkan profesionalitas tenaga pemeriksa; mengembangkan dan meningkatkan Sistem Informasi Aparat Pengawasan Internal Pemerintah dan perbaikan kualitas informasi hasil pengawasan; kode etik dan standar audit; melakukan evaluasi berkala atas kinerja dan temuan hasil pengawasan baik



internal maupun eksternal. Selain itu dengan adanya Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 15 Tahun 2009 tentang Jabatan Fungsional Pengawas Intern Pemerintah (APIP) yang terdiri dari Auditor, Audiwan dan P2UPD dan angka kreditnya, diharapkan dapat menjadi motivator bagi para aparatur pengawasan untuk lebih meningkatkan kinerjanya melalui peningkatan kualitas pengawasan.

Uraian yang telah disebutkan diatas merupakan salah satu pelaksanaan dari fungsi manajemen yaitu pengawasan, penegertian pengawasan tersebut perlu ditanamkan kepada setiap pejabat pemerintah dan masyarakat untuk menjamin terlaksananya perencanaan suatu kegiatan yang telah ditetapkan sesuai peraturan perundangan yang berlaku . Setiap pejabat pemerintah dan masyarakat diharapkan turut berpartisipasi dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik.

Inspektorat Kota Cilegon sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah yang berdasarkan Peraturan Daerah Kota Cilegon Nomor 03 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah dan Peraturan Walikota Nomor 7 Tahun 2020 tentang Organisasi dan tata kerja Inspektorat Kota Cilegon, mempunyai tugas pokok melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan dan penyelenggaraan urusan dan penyelenggaraan pemerintahan di daerah, dalam kaitan tersebut Inspektorat Kota Cilegon tentunya harus melaksanakan tindakan korektif atas penyimpangan yang dilakukan dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di daerah apabila tidak sesuai dengan Peraturan Perundangan yang berlaku. Paradigma Inspektorat pada saat ini adalah sebagai quality assurance atas penjamin mutu dan Consulting Partner atau sebagai konsultan dan early warning system, paradigmanya menjadi berubah yang tadinya sebagai pemeriksa saat ini lebih ditekankan melakukan pembinaan kepada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang bernaung di dalam Pemerintahan Kota Cilegon. Hal tersebut sangat perlu dilakukan guna mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih di Lingkungan Pemerintah Kota Cilegon.

Untuk melaksanakan tugas tersebut Inspektorat Kota Cilegon selaku unsur pengawas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah mempunyai fungsi:

1. Perumusan kebijakan tekhnis bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan;
2. Pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, review, evaluasi, pementauan dan kegiatan pengawasan lainnya;

3. Pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Walikota;
4. Penyusunan Laporan Hasil Pengawasan;
5. Pelaksanaan administrasi Inspektorat; dan
6. Pelaksanaan fungsi lainnya yang diberikan oleh Walikota terkait dengan tugas dan fungsinya.

Pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi Inspektorat Kota Cilegon dituangkan melalui Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) dengan berpedoman pada kebijakan pengawasan. PKPT disusun didasarkan atas prinsip keserasian, keterpaduan, dan menghindari temuan berulang serta memperhatikan efisiensi anggaran dan efektifitas dalam penggunaan sumberdaya manusia sehingga tumpang tindih kegiatan maupun anggaran tidak terjadi.

### **3.2 TUJUAN DAN SASARAN**

Untuk mewujudkan hasil yang akan dicapai selama periode perencanaan 2021 – 2026 sesuai dengan Renstra yang disusun pada Tahun 2021 ini, Inspektorat Kota Cilegon telah merumuskan tujuan yang terkait dengan misi ke-1 RPJMD yaitu Menghadirkan Pemerintahan Daerah yang Profesional dan Akuntabel dengan indikator sasaran yang diampu oleh Inspektorat adalah sebagai berikut :

- 1) Nilai LAKIP Perangkat Daerah
- 2) Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah
- 3) Indeks Manajemen Risiko
- 4) Indeks Kapabilitas APIP

### **3.3 RENCANA PROGRAM**

Dalam rangka mewujudkan sasaran – sasaran yang strategis yang telah dirumuskan diatas, dilakukan dengan menetapkan program – program yang selaras dengan pencapaian indikator sasaran

Berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Cilegon Tahun 2021 – 2026, terdapat 2 (dua) Program teknis pendukung urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Inspektorat Kota Cilegon dan 1 (satu) program yang bersifat penunjang yaitu Program Dukungan Layanan Pemerintah untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi diantaranya adalah penunjang administrasi perkantoran, peningkatan sarana dan prasarana pendukung operasional dan peningkatan disiplin aparatur.

Berdasarkan hal tersebut diatas maka pada tahun 2022 Inspektorat Kota Cilegon direncanakan didukung oleh 3 (tiga) Program yaitu :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah kab/Kota;
2. Program Penyelenggaraan Pengawasan;
3. Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi.

### **3.4 RENCANA KEGIATAN**

Dalam mendukung tercapainya indikator capaian program diatas, maka kegiatan dan sub kegiatan yang akan dilaksanakan harus diselaraskan output kinerja dan anggarannya. Adapun secara detail rencana kegiatan tahun 2022 Inspektorat Kota Cilegon dapat disajikan sebagai berikut :

Tabel 3.1 Rincian Rencana Kegiatan Inspektorat Kota Cilegon Tahun 2022

<b>Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan</b>	<b>Keluaran Sub Kegiatan</b>	<b>Keluaran Sub Kegiatan</b>
<b>UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN</b>		
<b>INSPEKTORAT DAERAH</b>		
<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>		
<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>		
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersedianya Dokumen Renstra OPD Tersusunnya dokumen perencanaan kinerja	1 Dokumen 1 Dokumen
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Tersusunnya Dokumen RKA SKPD	1 Dokumen
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Tersusunnya Dokumen RKA Perubahan SKPD	1 Dokumen
Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD		
Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD		
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Capaian Kinerja SKPD	4 Kegiatan
<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>		
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya ASN yang berkompeten	12 Bulan
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Terlaksananya Penatausahaan dan pengujian/verifikasi Keuangan SKPD	12 Bulan
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Tersedianya Laporan Keuangan bulanan/triwulanan/semesteran Inspektorat	2 Dokumen
<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>		
Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Tersedianya Sarana Prasarana Disiplin Pegawai	2 Unit
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Tersedianya Pakaian Dinas Inspektorat Beserta Atribut Kelengkapannya	2 Jenis
Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Tersedianya Tim Penilai Angka Kredit Pegawai	6 Tim

<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>		
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	12 Bulan
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	12 Bulan
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	12 Bulan
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya bahan Logistik Kantor	12 Bulan
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan Kantor	12 Bulan
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang undangan	12 Bulan
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terselenggaranya Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Bulan
<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>		
Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Tersedianya Kendaraan Dinas Jabatan	5 Unit
Pengadaan Mebel	Tersedianya mebel penunjang perlengkapan kantor	3 Set
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	4 Jenis
Pengadaan Aset Tak Berwujud	Tersedianya Sistem Pengawasan dan pendukung pengawasan	1 Sistem
<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>		
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya materai	12 Bulan
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya Jasa Komunikasi Kantor	12 Bulan
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	12 Bulan
<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>		
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Tersedianya kendaraan Dinas jabatan dalam kondisi baik	12 Bulan
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tersedianya kendaraan dinas operasional dalam kondisi baik	12 Bulan
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terpeliharanya peralatan dan mesin lainnya	12 Bulan
Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Tersedianya Sistem Pengawasan dan pendukung pengawasan dengan kondisi baik	12 Bulan

<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN</b>		
<b>Penyelenggaraan Pengawasan Internal</b>		
Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah		
Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah		
Reviu Laporan Kinerja		
Reviu Laporan Keuangan	Terlaksananya Reviu laporan Keuangan Pemerintah Daerah	1 Kegiatan
Kerjasama Pengawasan Internal	Terlaksananya Kerjasama Pengawasan Internal	1 Kegiatan
Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Jumlah Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut hasil Pemeriksaan BPK RI dan APIP	4 Kegiatan
<b>Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu</b>		
Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	Pelaksanaan Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	7 Kegiatan
Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Terlaksananya Pengawasan dengan Tujuan tertentu	5 Kegiatan
<b>PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI</b>		
<b>Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan</b>		
Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	Evaluasi dan Penyusunan Rancangan Perwal Evaluasi dan Penyusunan SOP Pengawasan Penyusunan PKPT	1 Kegiatan 1 Kegiatan 1 Kegiatan
<b>Pendampingan dan Asistensi</b>		
Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	Cash dan Stok Opname Monitoring Dana BOS Monitoring DPWkel Montoring BUMD Pendampingan Penyusunan Laporan Keuangan Pendampingan Penyusunan Laporan Kinerja	1 Kegiatan 1 Kegiatan 1 Kegiatan 1 Kegiatan 1 Kegiatan
Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Evaluasi Dokumen Reformasi Birokrasi Pendampingan Penyusunan Dokumen Reformasi Birokrasi Terselenggaranya pendampingan pembentukan WBS Terselenggaranya Pendampingan pencegahan Conflik of Interest	1 Kegiatan 1 Kegiatan 1 Kegiatan 1 Kegiatan



Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Terlaksananya Monitoring Capaian MCP Terlaksananya Sosialisasi Penanganan Gratifikasi Terlaksananya Sosialisasi Saber Pungli	4 Kegiatan 1 Kegiatan 1 Kegiatan
Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	Terlaksananya kegiatan Peningkatan Integritas APIP Tersusunnya Dokumen Survey Penilaian Integritas	1 Kegiatan 1 Dokumen

## BAB IV

# RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

### 4.1 Pendanaan / Pagu Indikatif APBD Tahun 2022

Inspektorat Kota Cilegon telah menyusun rencana Program dan Kegiatan yang untuk Tahun Anggaran 2022 yang mengacu pada dokumen Rencana Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Cilegon Tahun 2021 - 2026 dan Renstra Inspektorat Kota Cilegon Tahun 2021 – 2026, adapun rencana pagu anggaran indikatif untuk Inspektorat Kota Cilegon pada Tahun 2022 lebih jelas dapat dilihat pada rincian Program dan kegiatan dengan Pagu Indikatif sebagai berikut :

Tabel 4. Rencana Pagu Program dan Kegiatan Inspektorat Kota Cilegon Tahun 2022

Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana
<b>UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN</b>		
<b>INSPEKTORAT DAERAH</b>	<b>22.916.000.000</b>	
<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>19.496.000.000</b>	
<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>84.000.000</b>	
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	40.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	6.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	6.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	6.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	6.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	20.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)



<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>15.270.000.000</b>	
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	15.000.000.000	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	250.000.000	PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD)
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semes teran SKPD	20.000.000	PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD)
<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>430.000.000</b>	
Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	30.000.000	PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD)
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	100.000.000	PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD)
Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	300.000.000	PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD)
<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>877.000.000</b>	
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	7.000.000	PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD)
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	200.000.000	PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD)
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	25.000.000	PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD)
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	170.000.000	PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD)
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	115.000.000	PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD)
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	60.000.000	PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD)
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	300.000.000	PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD)
<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>2.020.000.000</b>	
Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	1.700.000.000	PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD)



Pengadaan Mebel	60.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	150.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Pengadaan Aset Tak Berwujud	110.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>65.000.000</b>	
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	5.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	10.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	50.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>750.000.000</b>	
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	225.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	300.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	175.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	50.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN</b>	<b>2.450.000.000</b>	
<b>Penyelenggaraan Pengawasan Internal</b>	<b>2.175.000.000</b>	
Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	600.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	600.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Reviu Laporan Kinerja	200.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

Reviu Laporan Keuangan	75.000.000	PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD)
Kerjasama Pengawasan Internal	100.000.000	PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD)
Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	600.000.000	PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD)
<b>Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu</b>	<b>275.000.000</b>	
Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	150.000.000	PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD)
Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	125.000.000	PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD)
<b>PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI</b>	<b>970.000.000</b>	
<b>Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan</b>	<b>150.000.000</b>	
Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	150.000.000	PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD)
<b>Pendampingan dan Asistensi</b>	<b>820.000.000</b>	
Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	120.000.000	PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD)
Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	250.000.000	PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD)
Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	200.000.000	PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD)
Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	250.000.000	PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD)
<b>JUMLAH</b>	<b>22.916.000.000</b>	

## **BAB V**

### **PENUTUP**

Rencana Kerja (Renja) menjadi sangat penting artinya dalam mengaplikasikan berbagai persoalan-persoalan terkait dengan perencanaan pembangunan daerah sebagai wujud nyata dari tanggung jawab pemerintah dalam mengadopsi berbagai kebutuhan masyarakat yang mengedapankan perencanaan pembangunan yang berbasis pada masyarakat, Community Base Development (CBD) dengan keterlibatan lebih banyak para pelaku-pelaku (stakeholders) dalam menciptakan Good Governance sesuai dengan tuntutan paradigma baru, yang pada gilirannya akan mampu menciptakan kebijaksanaan yang dampaknya merembes kebawah (trickle down effect) sehingga keberpihakan pada masyarakat kecil benar-benar dikedepankan.

Output Rencana Kerja Inspektorat Kota Cilegon adalah Program Tahunan Inspektorat Kota Cilegon yang sesuai dengan tugas pokok, fungsi dan sasaran Program Inspektorat Kota Cilegon.

Rencana Kerja (RENJA) Inspektorat Kota Cilegon dengan total anggaran Rp. **22.916.000.000,-** selain menjadi pelaksanaan kegiatan selama Tahun 2022 berfungsi pula sebagai sarana peningkatan kinerja Inspektorat. Sebagai bahan pelaksanaan kegiatan selama Tahun 2022, RENJA juga dapat digunakan sebagai sarana untuk melakukan kegiatan yang dilaksanakan dalam satu tahun bagi seluruh jajaran Inspektorat Kota Cilegon. RENJA juga memberikan umpan balik yang sangat diperlukan dalam pengambilan keputusan dan penyusunan rencana di masa mendatang oleh para pimpinan manajemen dan seluruh staf Inspektorat Kota Cilegon sehingga akan diperoleh peningkatan kinerja ke arah yang lebih baik dimasa datang.

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah  
Kota Cilegon  
Tahun 2022**

Unit Organisasi : 6.01.0.00.0.00.01.00 INSPEKTORAT  
Sub Unit Organisasi : 6.01.0.00.0.00.01.00 INSPEKTORAT

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023						
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)			
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target				
<b>6</b>		<b>UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN</b>															
<b>6</b>	<b>01</b>	<b>INSPEKTORAT DAERAH</b>										<b>22,916,000,000</b>			<b>0</b>		
<b>6</b>	<b>01</b>	<b>01</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>										<b>19,496,000,000</b>			<b>0</b>	
<b>6</b>	<b>01</b>	<b>01</b>	<b>2.01</b>	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>										<b>84,000,000</b>			<b>0</b>
6	01	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersedianya Dokumen Renstra OPD Tersusunnya dokumen perencanaan kinerja		Kota Cilegon, Purwakarta, Kotabumi		1 Dokumen 1 Dokumen		40,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			0	
6	01	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Tersusunnya Dokumen RKA SKPD				1 Dokumen		6,000,000				0	
6	01	01	2.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Tersusunnya Dokumen RKA Perubahan SKPD				1 Dokumen		6,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			0	
6	01	01	2.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD							6,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			0	
6	01	01	2.01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD							6,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			0	
6	01	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Capaian Kinerja SKPD				4 Kegiatan		20,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			0	
<b>6</b>	<b>01</b>	<b>01</b>	<b>2.02</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>										<b>15,270,000,000</b>			<b>0</b>
6	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya ASN yang berkompeten				12 Bulan		15,000,000,000	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat			0	
6	01	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Terlaksananya Penatausahaan dan pengujian/verifikasi Keuangan SKPD				12 Bulan		250,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			0	
6	01	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Tersedianya Laporan Keuangan bulanan/triwulanan/semesteran Inspektorat				2 Dokumen		20,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			0	
<b>6</b>	<b>01</b>	<b>01</b>	<b>2.05</b>	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>										<b>430,000,000</b>			<b>0</b>
6	01	01	2.05	01	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Tersedianya Sarana Prasarana Disiplin Pegawai				2 Unit		30,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			0	
6	01	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Tersedianya Pakaian Dinas Inspektorat Beserta Atribut Kelengkapannya				2 Jenis		100,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			0	

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah  
Kota Cilegon  
Tahun 2022**

Unit Organisasi : 6.01.0.00.0.00.01.00 INSPEKTORAT  
Sub Unit Organisasi : 6.01.0.00.0.00.01.00 INSPEKTORAT

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023			
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
6.01.01.2.05.05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai		Tersedianya Tim Penilai Angka Kredit Pegawai				6 Tim		300,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				0
<b>6.01.01.2.06</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>								<b>877,000,000</b>					<b>0</b>
6.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				12 Bulan		7,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				0
6.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor				12 Bulan		200,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				0
6.01.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga		Tersedianya Peralatan Rumah Tangga				12 Bulan		25,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				0
6.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor		Tersedianya bahan Logistik Kantor				12 Bulan		170,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				0
6.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan Kantor				12 Bulan		115,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				0
6.01.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan		Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan				12 Bulan		60,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				0
6.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Terselenggaranya Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Bulan		300,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				0
<b>6.01.01.2.07</b>	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>								<b>2,020,000,000</b>					<b>0</b>
6.01.01.2.07.01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		Tersedianya Kendaraan Dinas Jabatan				5 Unit		1,700,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				0
6.01.01.2.07.05	Pengadaan Mebel		Tersedianya mebel penunjang perlengkapan kantor				3 Set		60,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				0
6.01.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya				4 Jenis		150,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				0
6.01.01.2.07.08	Pengadaan Aset Tak Berwujud		Tersedianya Sistem Pengawasan dan pendukung pengawasan				1 Sistem		110,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				0
<b>6.01.01.2.08</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>								<b>65,000,000</b>					<b>0</b>

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah  
Kota Cilegon  
Tahun 2022**

Unit Organisasi : 6.01.0.00.0.00.01.00 INSPEKTORAT

Sub Unit Organisasi : 6.01.0.00.0.00.01.00 INSPEKTORAT

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023			
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
6.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat		Tersedianya materai				12 Bulan		5,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			0	
6.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Tersedianya Jasa Komunikasi Kantor				12 Bulan		10,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			0	
6.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor				12 Bulan		50,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			0	
<b>6.01.01.2.09</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>								<b>750,000,000</b>				<b>0</b>	
6.01.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		Tersedianya kendaraan Dinas jabatan dalam kondisi baik				12 Bulan		225,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			0	
6.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Tersedianya kendaraan dinas operasional dalam kondisi baik				12 Bulan		300,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			0	
6.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Terpeliharanya peralatan dan mesin lainnya				12 Bulan		175,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			0	
6.01.01.2.09.08	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud		Tersedianya Sistem Pengawasan dan pendukung pengawasan dengan kondisi baik				12 Bulan		50,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			0	
<b>6.01.02</b>	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN</b>								<b>2,450,000,000</b>				<b>0</b>	
<b>6.01.02.2.01</b>	<b>Penyelenggaraan Pengawasan Internal</b>								<b>2,175,000,000</b>				<b>0</b>	
6.01.02.2.01.01	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah								600,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			0	
6.01.02.2.01.02	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah								600,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			0	
6.01.02.2.01.03	Reviu Laporan Kinerja								200,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			0	
6.01.02.2.01.04	Reviu Laporan Keuangan		Terlaksananya Reviu laporan Keuangan Pemerintah Daerah				1 Kegiatan		75,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			0	

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah  
Kota Cilegon  
Tahun 2022**

Unit Organisasi : 6.01.0.00.0.00.01.00 INSPEKTORAT  
Sub Unit Organisasi : 6.01.0.00.0.00.01.00 INSPEKTORAT

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023			
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
6.01.02.2.01.06	Kerjasama Pengawasan Internal		Terlaksananya Kerjasama Pengawasan Internal				1 Kegiatan		100,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				0
6.01.02.2.01.07	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP		Jumlah Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut hasil Pemeriksaan BPK RI dan APIP				4 Kegiatan		600,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				0
<b>6.01.02.2.02</b>	<b>Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu</b>								<b>275,000,000</b>					<b>0</b>
6.01.02.2.02.01	Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah		Pelaksanaan Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah				7 Kegiatan		150,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				0
6.01.02.2.02.02	Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu		Terlaksananya Pengawasan dengan Tujuan tertentu	Kota Cilegon, Purwakarta, Ramanuju			5 Kegiatan		125,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				0
<b>6.01.03</b>	<b>PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI</b>								<b>970,000,000</b>					<b>0</b>
<b>6.01.03.2.01</b>	<b>Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan</b>								<b>150,000,000</b>					<b>0</b>
6.01.03.2.01.01	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan		Evaluasi dan Penyusunan Rancangan Perwal Evaluasi dan Penyusunan SOP Pengawasan Peyusunan PKPT				1 Kegiatan 1 Kegiatan 1 Kegiatan		150,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				0
<b>6.01.03.2.02</b>	<b>Pendampingan dan Asistensi</b>								<b>820,000,000</b>					<b>0</b>
6.01.03.2.02.01	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah		Cash dan Stok Opname Monitoring Dana BOS Monitoring DPWkel Montoring BUMD Pendampingan Penyusunan Laporan Keuangan Pendampingan Penyusunan Laporan Kinerja				1 Kegiatan 1 Kegiatan 1 Kegiatan 1 Kegiatan 1 Kegiatan		120,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				0
6.01.03.2.02.02	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi		Evaluasi Dokumen Reformasi Birokrasi Pendampingan Penyusunan Dokumen Reformasi Birokrasi Terselenggaranya pendampingan pembentukan WBS Terselenggaranya Pendampingan pencegahan Conflik of Interest	Kota Cilegon, Purwakarta, Ramanuju			1 Kegiatan 1 Kegiatan 1 Kegiatan		250,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				0
6.01.03.2.02.03	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi		Terlaksananya Monitoring Capaian MCP Terlaksananya Sosialisasi Penanganan Gratifikasi Terlaksananya Sosialisasi Saber Pungli				4 Kegiatan 1 Kegiatan 1 Kegiatan		200,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				0



**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah  
Kota Cilegon  
Tahun 2022**

Unit Organisasi : 6.01.0.00.0.00.01.00 INSPEKTORAT

Sub Unit Organisasi : 6.01.0.00.0.00.01.00 INSPEKTORAT

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023			
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
6.01.03.2.02.04	Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas		Terlaksananya kegiatan Peningkatan Integritas APIP Tersusunnya Dokumen Survey Penilaian Integritas		Kota Cilegon, Purwakarta, Ramanuju		1 Kegiatan 1 Dokumen		250,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				0
<b>TOTAL</b>									<b>22,916,000,000</b>				<b>0</b>	